

INTEGRALISTIK KURIKULUM TAHUN 2013

Oleh :
Moch Fatkhuronji

Abstrak

Perubahan kurikulum yang datang silih berganti dalam kurikulum pendidikan di Indonesia membawa dampak yang kurang stabil dalam membentuk karakter dan watak bangsa untuk memiliki ciri khusus dalam pendidikan, berbeda dengan negara-negara maju lainnya yang fokus untuk menangani pendidikan dengan program step by step. Secara sekilas dapat digambarkan bahwa, kurikulum pendidikan di Indonesia selalu berubah-ubah sejak awal kurikulum 1947 yang berorientasi pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Penggantian kurikulum di Indonesia terdapat semacam konvensi bahwa penggantian kurikulum biasanya dilakukan sekitar sepuluh tahun dari masa berlakunya, kurikulum 1975 usianya sembilan tahun ketika diganti dengan kurikulum 1984. Kurikulum 1984 usianya sepuluh tahun ketika diganti dengan kurikulum 1994 dan kurikulum 1994 usianya sepuluh tahun ketika diganti dengan KBK atau kurikulum 2004. Namun, menimbulkan suatu pertanyaan, ketika KBK diganti KTSP. KBK yang seharusnya diganti sekitar tahun 2014, tetapi dalam jangka waktu dua tahun sudah berganti dengan KTSP, kenapa? Dan sekarang KTSP baru tujuh tahun sudah diganti dengan kurikulum 2013, ada apa sebenarnya dengan kurikulum pendidikan di Indonesia ini? Walaupun perlu disadari bahwa kurikulum bukanlah satu-satunya penentu dalam melahirkan jati diri seseorang dalam kehidupan dimasa akan datang. Akan tetapi kurikulum mempunyai posisi yang strategis untuk mengarahkan dan membentuk watak dan perilaku seseorang di masyarakat

yang akan datang.

Kata kunci: kurikulum 2013 dan integralistik

A. Latar Belakang Masalah

Ketika Universitas Negeri Semarang dengan gerakan profesor mengajar di sekolah atau dikenal dengan “Professor go to schools” mengingatkan kembali akan masa-masa para pejuang pendidikan yang tanpa mengenal lelah dengan gelar, pangkat, dan kedudukan yang disandangnya. Gerakan go to schools membuat banyak perubahan paradigma pendidikan, selama ini profesor dikenal sebagai kaum pendidikan elitis, dan formalis tiba-tiba begitu menarik simpati para anak didik, orang tua dan pengelola pendidikan. Dari sudut pandang pendidikan sangatlah memberi makna yang mendalam apabila para pakar dan cendekiawan pendidikan mau turun ke lapangan untuk melihat realitas praktek pengajaran dan pembelajaran. Dan ini sesuai dengan gerakan reformasi yang memiliki konsekuensi logis pada isu-isu publik yang menuju pada perubahan dan pembaharuan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu isu tersebut adalah tentang pembaharuan pendidikan nasional yang kemudian berkembang dalam wacana otonomi pendidikan atau dalam ungkapan lain adalah desentralisasi pendidikan (Farih, 2009:1). Reformasi pendidikan yang mendasar adalah lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu sektor pembangunan yang berbasis kedaerahan lainnya dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai pengganti UU No. 2 tahun 1989. Kedua undang-undang tersebut membawa perspektif baru yang amat revolusioner dalam konteks perbaikan sektor pendidikan, yang mendorong pendidikan sebagai urusan publik dan urusan masyarakat baik dalam kebijakan kurikulum, manajemen maupun berbagai kebijakan pengembangan institusi pendidikan itu sendiri.

Pendidikan juga diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik

(Tirtaharja, Sulo, 2005: 34). Pendidikan berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang berbudi luhur, cerdas, kreatif dan mandiri. Oleh karena itu dunia pendidikan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah berkaitan dengan tuntutan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, sebab melalui proses pendidikan akan terlahir generasi muda yang berkualitas yang diharapkan mampu mengikuti perubahan dan perkembangan kemajuan zaman disegala aspek kehidupan. Pembelajaran juga harus sesuai dengan standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Sanjaya, 2006:4).

Perubahan kurikulum yang datang silih berganti dalam kurikulum pendidikan di Indonesia membawa dampak yang kurang stabil dalam membentuk karakter dan watak bangsa untuk memiliki ciri khusus dalam pendidikan, berbeda dengan negara-negara maju lainnya yang fokus untuk menangani pendidikan dengan program step by step. Secara sekilas dapat digambarkan bahwa, kurikulum pendidikan di Indonesia selalu berubah-ubah sejak awal kurikulum 1947 yang berorientasi pada pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat sampai pada sepuluh tahun terakhir ini kurikulum pendidikan di Indonesia masih mengalami perubahan. Konsep kurikulum tahun 2004 yang berbasis kompetensi diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa khususnya dalam bidang pendidikan, dengan mempersiapkan peserta didik, melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pendidikan secara efektif, efisien dan berhasil guna (Mulyasa, 2003:vi). Kemudian tahun 2006 kurikulum berubah lagi menjadi KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan), dan sekarang muncul kurikulum tahun 2013 yang diharapkan akan mampu memperbaiki kompetensi lulusan dengan empat standar yang diharapkan dapat menjadi tolak ukur perbaikan kompetensi lulusan yakni standar kompetensi lulusan,

standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Semua perubahan yang ada dalam kurikulum itu akan membawa problem baru dalam pendidikan. Contohnya berkaitan dengan waktu, penggantian kurikulum di Indonesia terdapat semacam konvensi bahwa penggantian kurikulum biasanya dilakukan sekitar sepuluh tahun dari masa berlakunya, kurikulum 1975 usianya sembilan tahun ketika diganti dengan kurikulum 1984. Kurikulum 1984 usianya sepuluh tahun ketika diganti dengan kurikulum 1994 dan kurikulum 1994 usianya sepuluh tahun ketika diganti dengan KBK atau kurikulum 2004. Namun, menimbulkan suatu pertanyaan, ketika KBK diganti KTSP. KBK yang seharusnya diganti sekitar tahun 2014, tetapi dalam jangka waktu dua tahun sudah berganti dengan KTSP, kenapa? Dan sekarang KTSP baru tujuh tahun sudah diganti dengan kurikulum 2013, ada apa sebenarnya dengan kurikulum pendidikan di Indonesia ini?

Paparan di atas dapat menggambarkan tentang banyaknya problematika pendidikan di Indonesia yang masih cukup kompleks. Kurikulum pendidikan Indonesia sangat membutuhkan pemecahan yang serius dan kontinyu. *Goal* untuk membentuk *outcome* pendidikan yang berkualitas dan memiliki karakter yang kuat dengan tidak meninggalkan nilai-nilai etika-moral masih perlu diperjuangkan. Integralistik nilai-nilai yang ada dalam kurikulum selama ini masih perlu didiskusikan untuk mendapatkan format yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Di sinilah, penulis mencoba untuk menggali problem-problem yang terdapat dalam kurikulum pendidikan. Apakah benar, kurikulum merupakan salah satu elemen terpenting dalam proses pendidikan? Apakah kurikulum 2013 ini nanti memberikan harapan besar untuk melakukan reformasi pendidikan? Apakah pembaharuan dan perubahan kurikulum ini merupakan langkah yang tepat untuk membentuk karakter manusia. Dan atau karena tuntutan perkembangan zaman dan kebijakan pemerintah yang butuh idealisme?

B. Pembahasan

1. Makna Kurikulum

Istilah kurikulum muncul untuk pertama kalinya dalam kamus Webster tahun 1856. Pada tahun itu kata kurikulum digunakan dalam bidang olah raga. Yakni suatu alat yang membawa orang dari start sampai finish. Kemudian pada tahun 1955 kata kurikulum muncul dalam kamus tersebut. Khusus digunakan dalam bidang pendidikan yang artinya sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi, yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tingkat tertentu atau ijazah,(Alcom and Linely. 1959:3).

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu” (Dirjen Pendis. 2007:7).

Menurut Tim Diklatik Metodik IKIP Surabaya (1993:97) mendefinisikan Kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, di dalam kelas, di halaman sekolah, maupun di luarnya atau segala kegiatan di bawah tanggung jawab sekolah yang mempengaruhi anak dalam pendidikannya.

Nasution dalam Armani Arief (2002: 29) kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, atau kurikulum adalah rencana pengajaran saja.

William B. Rayan dalam Nasution (1982: 28) menjelaskan kurikulum meliputi seluruh program dan kehidupan dalam sekolah yakni segala pengalaman anak di bawah tanggung jawab sekolah yang tidak hanya meliputi bahan pelajaran tetapi seluruh kehidupan dalam kelas. Jadi hubungan antara guru dan murid, metode mengajar, cara evaluasi termasuk dalam kurikulum.

Sedangkan menurut Idi (2007:205) mendefinisikan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengajaran mengenai isi bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menggunakan aktivitas belajar mengajar.

Beragam pengertian tersebut pada dasarnya sama sebagai bentuk upaya untuk memberikan atau menggali pengetahuan, pengalaman yang ada dalam diri masing-masing peserta didik agar mampu menghadapi masa depan. Namun begitu kurikulum bukanlah satu-satunya penentu dalam melahirkan jati diri seseorang dalam kehidupan dimasa akan datang. Akan tetapi kurikulum mempunyai posisi yang strategis untuk mengarahkan dan membentuk watak dan perilaku seseorang di masyarakat yang akan datang.

2. Kurikulum di Indonesia

Sejarah kurikulum di Indonesia mengalami perjalanan yang panjang dan sangat kompleks. Beragam kurikulum yang pernah ada di Indonesia ternyata masih belum mampu memberikan solusi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kondisi seperti itu seiring dengan di tandai oleh rendahnya mutu kelulusan, fasilitas dan sarana yang kurang memadai, serta banyak hal lain yang melingkupi problematika pendidikan kita. Begitu kompleksnya problem pendidikan di Indonesia berujung kepada keprihatinan terhadap kualitas sumber daya manusianya. Dalam catatan Human Development Report tahun 2003 versi UNDP menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia berada di urutan 112, jauh di bawah Filipina (25), Malaysia (58), Brunai Darussalam (31) dan Singapura (28).

Kenyataan seperti ini mengharuskan bangsa Indonesia untuk melakukan pembenahan-pembenahan, khususnya sektor pendidikan. Karena dengan pendidikan itu akan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri serta mampu menghadapi beragam tantangan zaman. Dalam kaitanya dengan kurikulum di Indonesia terdapat beberapa kurikulum yang pernah dijalani dan mengalami banyak perubahan diantaranya; tahun 1947, 1952, 1968, 1984, 1994, 2004, 2006 dan terakhir kurikulum 2013. Perubahan tersebut sebagai konsekuensi dari perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi dan iptek yang terjadi di tanah air. Mengingat, kurikulum sebagai seperangkat rencana pengajaran

dalam pendidikan yang perlu dikembangkan secara optimal dengan kedinamisannya sesuai tuntutan dan perubahan yang ada.

a. Perkembangan Kurikulum 2006 dan Sebelumnya

Awal perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi oleh pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga munculnya kurikulum 1947 yang dikenal dengan *Rentjana Pelajara*, hanya meneruskan pola pendidikan sebelumnya. Mengingat masih dalam semangat perjuangan kemerdekaan maka pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Baru pada tahun 1952 terdapat penyempurnaan kurikulum dengan sebutan *Rentjana Pelajaran Terurai* yang menekankan pada rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

Tahun 1964 kurikulum kembali mengalami penyempurnaan dengan sebutan *Rentjana Pendidikan 1964* yang menekankan pembekalan pada jenjang SD sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, *keprigelan* dan jasmani. Empat tahun kemudian 1968 dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembina Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum inipun mengalami perubahan pada tahun 1975 yang lebih menekankan pada 1) orientasi tujuan, 2) pendekatan integratoive dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peran yang menunjang tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif, 3) efeisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu, 4) pendekatan PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional). Maksudnya adalah sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa, 5) dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan pada *stimulus*

respons (rangsang jawab) dan latihan (*dril*).

Tuntutan globalisasi dan teknologi yang semakin tidak bisa dibendung mengisyaratkan untuk perubahan kurikulum 1975 yang sempat dibahas dalam sidang MPR 1983 dengan memasukkan produknya dalam GBHN 1983 untuk melakukan perubahan kurikulum 1975. Dari sinilah pemerintah menetapkan pergantian kurikulum 1975 ke kurikulum 1984.

Kurikulum 1984 ini berorientasi pada; *pertama*, tujuan instruksional. Berlandaskan pada pengalaman belajar siswa yang hanya sebentar di waktu sekolah, maka harus benar-benar dimanfaatkan secara efektif dalam memilih bahan ajar dengan merumuskan tujuan yang harus dicapai siswa. *Kedua*, pengajaran dengan menggunakan sistem CBSA (cara belajar siswa aktif). *Ketiga*, menggunakan pendekatan spiral, artinya pendekatan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan pada kedalaman dan keluasan bahan pelajaran sesuai jenjang sekolahnya masing-masing. *Keempat*, materi diajarkan berdasarkan kesiapan dan kematangan siswa, dari yang kongkrit, semikongkrit, semiabstrak dan abstrak. Dari mudah menuju sukar, dari sederhana menuju kompleks. *Kelima*, menanamkan pengertian dulu baru ke pelatihan. *Keenam*, menggunakan keterampilan proses, artinya pendekatan belajar mengajar yang memberi tekanan kepada proses pembentukan keterampilan memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pelajaran.

Keberadaan kurikulum 1994 sebagai penyempurna kurikulum 1984 dan pelaksanaannya sesuai UUSPN No. 2 1989. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Ciri dari kurikulum 1994 yang paling menonjol adalah sistem semester ke cawu, pembelajaran di sekolah menekankan pada materi yang cukup padat, bersifat populis, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia.

Kurikulum 1994 dianggap terlalu berat untuk dilaksanakan pada anak karena materi terlalu banyak yang harus diterima anak, maka lahirlah kurikulum 2004 sebagai respons dari perubahan struktural dalam pemerintahan yang semula sentralistik ke desentralistiki sebagai konsekuensi UU No. 22 dan 25 tentang otonomi daerah, dan kurikulum ini diberi nama KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). KBK adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah (Depdiknas, 2002). Kurikulum ini menitik beratkan pada pengembangan kemampuan melakukan (kompetensi) tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap perangkat kompetensi tertentu.

Namun baru berjalan dua tahun disempurnakan lagi menjadi kurikulum 2006 dengan sebutan KTSP. KTSP ini sebagai bentuk implementasi dari UUSPN No. 20 tahun 2003 dan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan *delapan standar nasional pendidikan*, yaitu: (1)*standar isi*, (2)*standar proses*, (3)*standar kompetensi lulusan*, (4)*standar pendidik dan tenaga kependidikan*, (5) *standar sarana dan prasarana*, (6)*standar pengelolaan*, *standar pembiayaan*, dan (7)*standar penilaian pendidikan*. Perbedaan mendasar dari kurikulum KTSP ini adalah sekolah diberi wewenang penuh dalam menyusun rencana pendidikannya dengan tetap mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, baik dari tujuan, visi-misi. Struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, kaldik hingga sylabus.

b. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 ini sebagai penyempurnaan dari

kurikulum 2006, yang menitik beratkan pada aspek kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan dan pengetahuan. Menurut Muhammad Nuh dalam acara Halaqoh Nasional Madrasah Diniyah Takmiliyah tanggal 6 Juni 2013 di Ponpes Modern Al Falah Songgom Brebes Jawa Tengah menegaskan bahwa, ciri kurikulum tahun 2013 ini terletak pada kemampuan guru dalam berpengetahuan dan mencari tahu pengetahuan sebanyak-banyaknya karena siswa sekarang sangat mudah mencari informasi dari teknologi dan informasi. Namun siswa juga dituntut untuk lebih maju lagi yakni memiliki kemampuan interpersonal, antarpersonal dan berpikir kritis serta tanggung jawab sosial di lingkungannya. Harapannya akan membentuk generasi yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif. Pendekatan tematik untuk anak-anak seusia SD/MI dikenalkan dengan pembelajaran integralistik antar tema-tema masuk dalam mapel IPA dan IPS yang diajarkan dalam mapel Bahasa Indonesia. Dalam kemendikbud.go.id terdapat empat aspek yang harus diperhatikan secara khusus dalam implementasi keterlaksanaan kurikulum 2013. *Pertama*, Kompetensi guru dalam pemahaman substansi bahan ajar, yang menyangkut metodologi pembelajaran, yang nilainya pada pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) baru mencapai rata-rata 44,46. *Kedua*, Kompetensi akademik di mana guru harus menguasai metode penyampaian ilmu pengetahuan kepada siswa. *Ketiga*, Kompetensi sosial yang harus dimiliki guru agar tidak bertindak asosial kepada siswa dan teman sejawat lainnya. *Keempat*, Kompetensi manajerial atau kepemimpinan karena guru sebagai seorang yang akan digugu dan ditiru siswa.

Penerapan kurikulum baru ini tentu memiliki tanggung jawab yang tidak ringan, guru dituntut untuk memiliki dedikasi, disiplin, kreatif, inovasi dalam mengembangkan pengetahuan dan kemampuan sesuai kompetensinya.

3. Integralistik Kurikulum Dalam Pembangunan Moral Bangsa

Perjalanan panjang kurikulum pendidikan di Indonesia selama ini selalu mengalami pembaharuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perubahan kurikulum harus dilakukan untuk mengetahui perkembangan ketercapaian tujuan pendidikan Nasional. Di Indonesia ada empat tujuan pendidikan utama yang secara hierarkis sebagai berikut: tujuan Nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler dan tujuan instruksional, (Haryati, 2011:7). Keempat tujuan pendidikan tersebut harus selaras dengan fungsi kurikulum sebagai pengembangan, penanaman, penyesuaian mental, perbaikan, pencegahan, pengajaran dan penyaluran. Tentu bukan persoalan yang mudah untuk mencapai kesana, namun perlu langkah-langkah strategis yang saling keterhubungannya. Nah kurikulum tahun 2013 yang sekarang sudah mulai diberlakukan ini, apakah semata-mata merupakan ruh perjuangan untuk menyempurnakan pendidikan atau hanya untuk memenuhi idealisme pemerintah. Apakah sistem sarana prasarana sudah memenuhi syarat kelayakan atau kualitas guru yang sudah dibekali dengan keilmuan, atau akan sama nasibnya dengan kurikulum-kurikulum terdahulu yang hanya sebentar sudah diformat baru. Namun apapun bentuknya datang kurikulum baru harus dapat memberi perubahan sesuai nilai-nilai perjuangan pendidikan bagi bangsa Indonesia *grass roots approach*, yaitu yang dimulai dari akar, *from the bottom up*, dari bawah ke atas, yakni dari pihak guru atau sekolah secara individual dengan harapan agar meluas ke sekolah-sekolah lain. Kurikulum boleh berubah seribu kali, tapi yang perlu diperhatikan jangan berubah karakter bangsa Indonesia yakni; ramah, jujur, rendah hati, sopan santun dan berakhlak mulia. Perubahan kurikulum harus integral dengan nilai-nilai falsafah bangsa dan patriotisme. Perubahan bukan untuk kepentingan para pejabat, teknokrat dan politikus, tetapi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.

C. Kesimpulan

Perubahan kurikulum pendidikan Indonesia sangat dibutuhkan,

dengan catatan tidak boleh meninggalkan *Goal* untuk membentuk *outcome* pendidikan yang berkualitas dan memiliki karakter yang kuat dengan tidak meninggalkan nilai-nilai etika-moral sebagai bangsa yang beradab. Implementasi kurikulum 2013 perlu dipertegas dan perjelas dalam mengintegristikkan muatan materi-ke dalam bidang studi lain. Perlunya sosialisasi secara menyeluruh untuk memberikan pemahaman secara simultan dari tingkat sekolah dasar sampai ke menengah. Demikian makalah sederhana ini, semoga ada manfaatnya, bila ada yang salah itu datang dari penulis dan bila benar itu datang dari Allah

DAFTAR PUSTAKA

- Alcom.D.Marvin and James M. Linely, 1959. *Issus in Curriculum Development*, New York Worlk Book Co.
- Arief. Armani. 2002. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press.
- Dirjen Pendis Depag RI. 2007. *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*, Jakarta: Depag RI.
- Idi, Abdullah. 2007. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Mulyasa. E. 2003. *Kurikulum Berbasis Kompeten:Konsep, Karakteristik dan Implementasinya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sanjaya, Wina. 2006. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Tim Dikdatik Metodik IKIP Surabaya. 1993. *Pengantar Dikdatik Metodik Kurikulum PBM*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Tirtarahadja, Umar dan Sulo, S.L. La. (2005). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution. 1982. *Azas-Azas Kurikulum*, Bandung: Jammars.